



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : MISNAWATI
- 2. Jabatan : SEKRETARIS KELURAHAN SAMBUTAN
- 3. NHK : 61910

II. DATA HARTA

- A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 364.900.000
- 1. Tanah Seluas 698 m2 di KOTA SAMARINDA , WARISAN Rp. 66.000.000
 - 2. Tanah Seluas 200 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
 - 3. Tanah Seluas 240 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
 - 4. Tanah Seluas 1015 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
 - 5. Tanah Seluas 375 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
 - 6. Tanah Seluas 930 m2 di KOTA SAMARINDA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 80.600.000
 - 7. Tanah Seluas 2456 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 8.600.000
 - 8. Tanah Seluas 150 m2 di KOTA SAMARINDA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 18.600.000
 - 9. Tanah Seluas 106.25 m2 di KOTA SAMARINDA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 28.600.000
 - 10. Tanah Seluas 200 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 102.000.000
 - 11. Bangunan Seluas 0 m2 di KOTA SAMARINDA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 35.500.000
- B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 1.300.000



1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1995, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 33.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.873.233

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 405.073.233

III. HUTANG Rp. 5.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 400.073.233

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.